



**LAPORAN
KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT PERSIAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CPNS 2019
KE KANREG IV BKN MAKASSAR-PROVINSI SULAWESI SELATAN
KAMIS - SABTU, 30 JAN – 1 FEB 2020**

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN SPESIFIK

Dalam rangka menajalankan tugas dan fungsi di bidang Pengawasan, Komisi II DPR RI melakukan kunjungan spesifik (Kunspek) ke Kantor Regional IV BKN Makassar, Kamis, 30 Januari s.d. 1 Februari 2020. Sesuai hasil Keputusan Rapat Internal Komisi II DPR RI Tanggal 13 Januari 2020, Kunspek itu dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Seleksi CPNS 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Saat ini, pemerintah sedang melakukan seleksi penerimaan CPNS dalam rangka pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk penerimaan CPNS tahun ini, pemerintah tidak membuka formasi tenaga administrasi karena saat ini jumlah tenaga administrative sudah mencapai 1.675.981 orang atau 39% dari total ASN di Indonesia. Pemerintah menerapkan prinsip rekrutmen ASN *zero growth* dengan tidak lagi melakukan rekrutmen tenaga administrasi umum hingga proporsi dan persebaran ASN mencapai angka berimbang untuk pembangunan.

Pendaftaran online telah dilaksanakan pada Senin tanggal 11 November 2019 hingga tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi. Setelah tahapan seleksi administrasi selesai, kini memasuki tahapan tes Seleksi Kompetensi Dasar yang pelaksanaannya dijadwalkan pada tanggal 27 Januari – 28 Februari 2020, dan akan dimulai secara bersamaan di seluruh instansi pusat dan daerah.

Mengingat pelamar CPNS sangat banyak maka penerimaan CPNS 2019 harus diimbangi dengan kesiapan setiap instansi terkait untuk kelancaran proses penerimaan CPNS tersebut. Untuk itu diperlukan koordinasi intensif dan terus menerus antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dengan instansi-instansi terkait lainnya agar penyelenggaraan rekrutmen tersebut berjalan dengan baik.

Sebagai mitra kerja dari Kementerian PANRB dan BKN yang merupakan instansi yang mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS, Komisi II DPR RI RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2019 harus dapat terselenggara dengan baik, lancar, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Disamping terkait seleksi penerimaan CPNS, dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan ini, Komisi II DPR RI juga ingin mendapatkan penjelasan berkaitan dengan Tenaga Honorer, khususnya penanganan terhadap Tenaga Honorer Kategori II yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tim Kunspek Komisi II DPR RI ke Kanreg IV BKN Makassar berjumlah **10 orang** anggota yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, **Yth. Bapak H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Fraksi Golkar** beserta anggota tim yang terdiri dari:

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1	A-270	H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG	KETUA TIM/ KETUA KOMISI II/F-GOLKAR
2	A-240	Drs. CORNELIS, MH	ANGGOTA/F-PDIP
3	A-308	TETI ROHATININGSIH, S.Sos	ANGGOTA/F-GOLKAR
4	A-310	AGUNG WIDYANTORO, SH., M.Si.	ANGGOTA/F-GOLKAR
5	A-79	Ir. H. KAMRUSSAMAD, ST., M.Si.	ANGGOTA/F-GERINDRA
6	A-116	R. IMRON AMIN, SH., MH	ANGGOTA/F-GERINDRA
7	A-384	M. SYAMSUL LUTHFI, SE	ANGGOTA/F-NASDEM
8	A-438	Dr. KH. SURAHMAN HIDAYAT, MA	ANGGOTA/F-PKS
9	A-455	KH. AUS HIDAYAT NUR	ANGGOTA/F-PKS

10	A-518	MITRA FAKHRUDDIN MB	ANGGOTA/F-PAN
11	----	DAHLIYA BAHNAN	KASUBAG SET KOMISI II
12	----	DICKY FIRMANSYAH	SEKRETARIAT KOMISI II
13	----	EKO SUPRIYANTO	PROTOKOL KIMISI II
14	----	SATYA ALVINO	TENAGA AHLI KOMISI II
15	----	WARDI TAUFIQ	TENAGA AHLI KOMISI II
16	----	ILA RACHMAYATI	TV PARLEMEN
17	----	RIA NUR MEGA	MEDIA SOSIAL

Tim kunspek didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli dan 3 (tiga) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) reporter dari TV parlemen dan 1 (satu) dari crew media sosial DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan spesifik Komisi II DPR RI Ke Kanreg IV BKN Makassar dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020. Kunjungan itu dimaksudkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dewan dibidang pengawasan terkait pelaksanaan seleksi CPNS 2019 dan permasalahan tenaga honorer.

II. HASIL KUNJUNGAN

a. Sambutan Bapak Drs. Harun Arsyad, S.H., M.H. (Kepala Kanreg IV BKN Makassar)

Wilayah kerja Kantor Regional IV BKN Makassar meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku. Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara berlokasi di Jl. Paccerakang No. 3 Daya Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Dibandingkan dengan 14 Kanreg yang lain, jangkauan wilayah kerja Kanreg IV Makassar adalah yang paling luas dan paling banyak, selain meliputi 5 Provinsi, juga melayani 61 kabupaten/kota. Sejauh ini, layanan Kanreg IV Makassar berjalan baik dan siap melaksanakan seluruh tahapan seleksi CPNS.

Sebagai perpanjangan BKN, Kantor Regional IV BKN Makassar dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Kantor Regional, 5 (lima) orang Kepala Bidang/Bagian pejabat se tingkat eselon III, 18 (delapan belas) orang Kepala Seksi/Kasubbag pejabat setingkat eselon IV, 35 (tiga puluh lima) orang pejabat fungsional tertentu, dan 56 (lima puluh enam) orang pejabat pelaksana. Jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 115 (seratus lima belas) orang, serta ditambah 18 (delapan belas) CPNS Penempatan UPT Kantor Regional IV BKN di Makassar.

Kanreg IV BKN Makassar adalah salah satu instansi Badan Kepegawaian Negara di daerah, yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Kanreg BKN menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas terkait pelaksanaan Seleksi CPNS 2019, Kanreg IV BKN Makassar telah melakukan koordinasi, bimbingan, pemberian petunjuk teknis kepada seluruh instansi terkait, khususnya instansi yang berada di bawah naungan Kanreg IV BKN Makassar. Untuk wilayah yang jauh dan terpencil, Kanreg IV BKN Makassar memaksimalkan peran pemda, dalam hal ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sehingga semuanya bisa berjalan lancar.

Meskipun demikian, ada beberapa kendala yang juga muncul dalam proses persiapan penerimaan CPNS di Sulsel, seperti perangkat computer yang membutuhkan tambahan unit. Tapi akhirnya semua bisa diatasi. Sebab, seleksi mandiri ini membebankan ke tiap pemerintah daerah menyediakan fasilitas komputer, termasuk menyiapkan lokasi tes yang sudah disurvei oleh tim BKN sebelumnya. Sementara BKN pusat dalam pelaksanaan seleksi CPNS hanya menyiapkan server dan soal-soal yang akan diberikan kepada peserta.

Sistem seleksi CPNS secara mandiri adalah untuk mendekatkan layanan ke masyarakat, dimana tiap lokasi tes sudah dihadirkan di tiap daerah masing-

masing. Sebelumnya, seleksi CPNS di Sulawesi Selatan hanya digelar di satu lokasi, dipusatkan di Kanreg IV BKN Makassar.

Dengan sistem yang mandiri ini, PPK (penjabat pembina kepegawaian), gubernur/bupati/walikota perlu menganggarkan pengadaan sarana parsananya agar proses seleksi CPNS bisa berjalan dengan baik.

b. Pemaparan Bapak H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua Tim Komisi II DPR RI)

Pada saat ini, salah satu fokus Komisi II DPR RI adalah berkaitan dengan Seleksi CPNS dan Penyelesaian Tenaga Honorer, khususnya yang THK-II. Dan komisi II DPR RI sudah membuat langkah-langkah serius dengan membentuk panja pengawasan terkait Seleksi CPNS dan Permasalahan Tenaga Honorer. Dalam menjalankan tugas pengawasan itu, komisi II DPR RI akan selalu mengundang pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian PANRB dan BKN yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan tersebut.

Secara khusus, kunjungan Komisi II DPR RI ke Kanreg IV BKN Makassar adalah berkaitan dengan pelaksanaan seleksi CPNS, yang saat ini sedang berlangsung tes Seleksi Kompetensi Dasar. Dengan kunjungan ini, Komisi II DPR RI bisa melihat secara langsung terhadap proses seleksi yang berjalan di lapangan. Seleksi CPNS 2019-2020 diharapkan berlangsung baik, objektif, sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku serta menghasilkan PNS yang berkualitas.

Penerimaan CPNS tahun 2019 diselenggarakan pada 66 instansi pusat dan 456 instansi daerah, yang tentu saja harus memperhatikan analisis jabatan, analisis beban kerja, kebutuhan instansi, potensi dan arah pembangunan daerah serta kondisi geografis. Kebutuhan formasi yang ditetapkan berdasarkan data yang ada berjumlah 150.315 formasi yang terdiri dari 36.935 formasi pusat dan 113.380 formasi daerah. Jumlah formasi CPNS tahun 2019 ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah formasi CPNS tahun 2018 yang berjumlah sebanyak 238.015 formasi. Sementara pelamar CPNS tahun 2019 lebih banyak dibandingkan pelamar tahun 2019.

Beberapa isu penting yang perlu dijelaskan oleh Kepala Kanreg IV BKN Makassar dan BKN Pusat, di antaranya, mengenai kesiapan sarana dan prasarana dalam setiap tahapan seleksi, termasuk di dalamnya soal keamanan jaringan dan server. Isu lain yang juga penting adalah terkait penurunan nilai Passing Grade dan langkah-langkah sosialisasinya, dan bagaimana pula terkait layanan bagi pelamar disabilitas, serta apa saja yang telah dilakukan untuk mengantisipasi praktek percaloan.

Disamping terkait seleksi penerimaan CPNS, dalam kunjungan kerja ke Kanreg IV Makassar, Komisi II DPR RI juga ingin mendapatkan penjelasan berkaitan dengan Tenaga Honorer, khususnya penanganan terhadap Tenaga Honorer Kategori II yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara lebih jelas, beberapa hal yang menjadi concern Komisi II DPR RI dalam kunjungan kali ini adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi tentang penurunan passing grade dan perubahan metode dalam soal-soal SKD.
- b. Penjelasan detail terkait alokasi formasi bagi penyandang disabilitas serta memastikan semua kebijakan dan proses rekrutmen bebas diskriminasi dan ramah bagi pelamar penyandang disabilitas.
- c. Mekanisme koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penerimaan CPNS tahun 2019 agar sarana, prasarana, dan daya dukung teknologi seperti kesiapan server, jaringan internet, dan ketersediaan daya listrik serta genset yang siap digunakan.
- d. Upaya BKN Kanreg IV Makassar untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya praktik percaloan dalam proses penerimaan CPNS.
- e. Kendala yang dihadapi oleh BKN Kanreg IV Makassar terkait persiapan dan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019.

- f. Penanganan masalah tenaga honorer kategori II sejak diterbitkannya PP No. 48 Tahun 2005 tentang tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS yang dalam perjalanannya mengalami dua kali perubahan yaitu PP No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 56 Tahun 2012.
- g. Jumlah tenaga honorer kategori II yang lulus penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2019 dan jumlah tenaga honorer kategori II yang lulus tes PPPK yang sudah ditetapkan NIP.

Poin-poin permasalahan terkait seleksi CPNS dan Tenaga Honorer sudah disampaikan sebelumnya, dan penjelasan tertulisnya juga sudah ada untuk selanjutnya secara bersama-sama akan dilakukan pendalaman.

c. Pemaparan Bapak Suharmen, S.Kom., M.Si. (Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN)

1). Tes Seleksi CPNS

Data ASN sudah terintegrasi di BKN. Dan seharusnya, masing-masing instansi mengintegrasikan seluruh data ASN-nya. Meskipun data terpusat di BKN, Kanreg tetap punya akses untuk mengelola data ASN di wilayah masing-masing melalui satu orang admin yang ditunjuk secara resmi.

Saat ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 4.189.121 orang. Komposisi dari jumlah ASN tersebut per 30 Desember 2019 tampak masih didominasi oleh Jabatan Pelaksana Administratif yang mencapai jumlah 38%, kemudian secara berurutan, fungsional guru, 35%; Struktural, 11%; Fungsional Teknis, 8%; dan Fungsional Medis, 7%. Idealnya, ASN didominasi tenaga fungsional. Seiring dengan kebijakan pengendalian ASN dan kebijakan pengurangan eselon maka secara bertahap tenaga fungsional akan terus ditingkatkan. Karena melihat tenaga administratif sangat dominan maka Men PANRB pada seleksi CPNS tahun 2019 tidak membuka formasi untuk tenaga administratif.

Jumlah pendaftar CPNS dalam seleksi CPNS tahun 2019 lebih banyak bila dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2018, pendaftar CPNS berjumlah 3.749.748 orang, dan yang dinyatakan lulus Administrasi berjumlah 2.763.478 orang. Sedangkan pada tahun 2019, pendaftar CPNS mencapai 4.197.218, dan yang lulus administrasi berjumlah 3364.864 orang. Hal itu berbanding terbalik dengan jumlah formasi yang diperebutkan. Pada seleksi CPNS tahun 2018, jumlah formasi berjumlah 238.015, jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah formasi tahun 2019 yang hanya berjumlah 150.315.

Melihat jumlah pendaftar yang lulus administrasi sangat banyak maka pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) disebar dalam 427 titik lokasi ujian. Pelaksanaan tes SKD ini sudah berlangsung mulai dari tanggal 27 Januari 2020 sampai 28 Februari 2020.

Untuk tes SKD di wilayah Kanreg IV Makassar, ada 72 titik lokasi untuk melayani Instansi Pusat dan Daerah dengan total peserta 257.915 orang, termasuk di dalamnya peserta wilayah provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang berjumlah **115.273** peserta.

2). Formasi Untuk Penyandang Disabilitas

Di Sulsel ada 3.990 formasi dengan total pendaftar ada 124.429 orang. Pendaftar yang lulus administrasi berjumlah 115.300 orang (umum 114.993, P1/TL 307 orang). Karena pendaftar P1/TL tidak semua ikut ujian, maka total yang ikut ujian berjumlah **115.273** peserta. Artinya, terdapat 92,67% pendaftar yang lulus seleksi administrasi. Sisanya dinyatakan tidak lulus. Pendaftar yang tidak lulus administrasi umumnya dikarenakan pendidikannya yang tidak sesuai dengan persyaratan.

Di Wilayah Sulsel juga terdapat 68 formasi untuk penyandang disabilitas. Jumlah pendaftar untuk formasi penyandang disabilitas hanya 34 orang. Sedangkan pendaftar disabilitas yang melamar selain formasi disabilitas ada 270 orang. Artinya, terdapat 270 orang pelamar disabilitas yang melamar di luar

formasi disabilitas, yang juga berarti menunjukkan bahwa formasi disabilitas yang ada belum memenuhi kualifikasi pendidikan para disabilitas.

3). Passing Grade & Tes SKD


Untuk menentukan kelulusan dalam tes SKD, BKN menggunakan system Passing Grade yang meliputi 3 kategori soal, yaitu: a) Tes Wawasan Kebangsaan dengan nilai ambang batas 65; b) Tes Intelegensia Umum dengan Nilai Ambang Batas 80; c) Tes Karakteristik Pribadi dengan Nilai Ambang Batas 126.

Jika mengacu pada Permen PANRB No. 24 Tahun 2019, Nilai ambang batas SKD CPNS 2019 pada materi TWK dan TKP mengalami penurunan dengan nilai ambang batas yang diterapkan pada tahun 2018 untuk formasi umum dan tenaga cyber. Jika Nilai Ambang Batas tahun 2018 pada materi TWK dan TKP masing-masing adalah 75 dan 143, maka pada tahun 2019, TWK dan TKP masing-masing 65 dan 126.

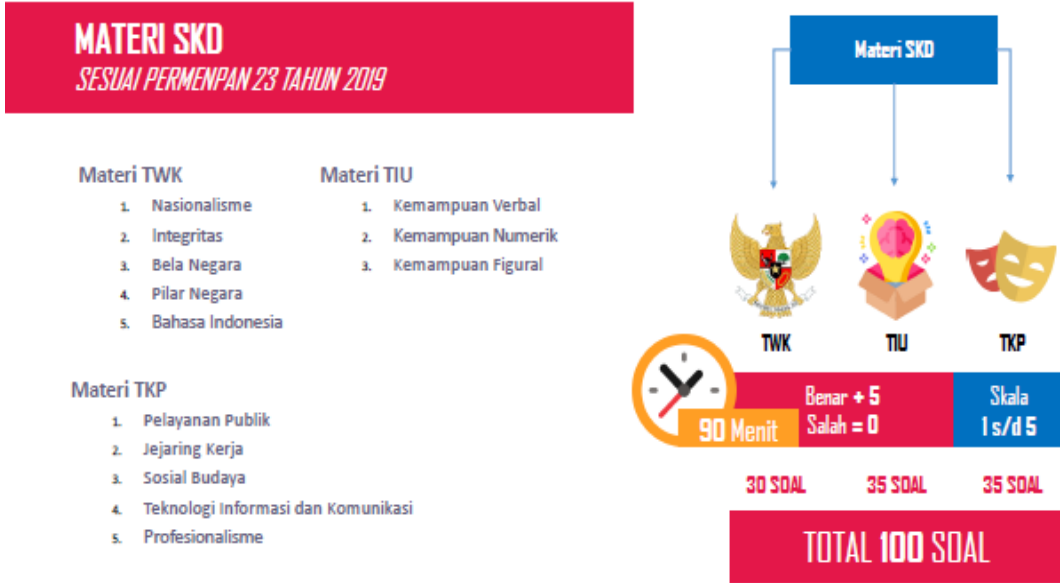
Meskipun Passing Grade diturunkan tapi kualitas atau bobot soal SKD tahun 2019 lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya. Namun, di tiap-tiap daerah bobot kesulitan soal SKD berbeda-beda. Hal itu tak lepas dari penyesuaian tingkat sumber daya manusia di seluruh daerah yang ada di Indonesia.

Selain itu, terdapat perbedaan komposisi soal TWK dan TIU dibandingkan tes CPNS tahun sebelumnya. Pada CPNS 2018, tes TWK terdiri dari 35 soal, sementara tahun 2019 menjadi 30 soal. Sementara tes TIU yang semula 30 soal menjadi 35 soal. Soal SKD disiapkan oleh tim konsorsium perguruan tinggi dan dikoordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud.

Penurunan nilai ambang batas pada kategori materi TWK dan TKP pada seleksi SKD tahun 2019 bila dibandingkan tahun 2018 bisa dilihat pada table berikut:

		PASSING GRADE				
		FORMASI JABATAN	TWK	TIU	TKP	TOTAL
 Nilai Ambang Batas SKD CPNS 2019 *Permenpan 24 Tahun 2019	Umum & Tenaga Cyber		65	80	126	271
	Cumlaude & Diaspora			85		271
	Disabilitas			70		260
	Putra/Putri Papua & Papua Barat			60		260
	Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Pendidik Klinis, Dokter, Dokter Gigi, Instruktur Penerbang			80		271
	Rescuer, Bosun, Jenang Kapal, Juru Mesin Kapal, Juru Minyak Kapal, Kelasi, Kerani, Oiler, Nakhoda, Muallim Kapal, Masinis Kapal, Kepala Kamar Mesin Kapal, Mandor Mesin Kapal, Juru Masak Kapal, dan Pengamat Gunung Api			70		260
Nilai Ambang Batas SKD CPNS 2018 *Permenpan 37 Tahun 2018	FORMASI JABATAN		TWK	TIU	TKP	TOTAL
	Umum		75	80	143	
	Cumlaude & Diaspora			85		298
	Disabilitas			70		260
	Putra Putri Papua & Papua Barat			60		260
	EKS THK II			60		260
	Dokter Spesialis, Instruktur Penerbang			80		298
	Petugas Ukur, Rescure, ABK, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercusuar, Pelatih/Pawang Hewan, Penjaga Tahanan			70		260

Sedangkan unsur-unsur dari masing-masing materi SKD sesuai Permen PANRB 23 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Adapun instansi yang telah dilayani untuk tes SKD sampai tanggal **29 Januari 2020** di wilayah sulsel adalah Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Selatan, Kab. Kepulauan Aru, dan Kota Ambon.

Sedangkan jadwal pelaksanaan tes yang sedang berlangsung di wilayah kerja Kanreg IV tanggal **30 Jan 2020** berlangsung di 14 titik lokasi sebagaimana table berikut:

**Jadwal pelaksanaan tes yang sedang berlangsung
(Wilayah kerja Kanreg IV tanggal 30 Januari 2020)**

INSTANSI	LOKASI
Pemerintah Kab. Gowa	Ruang ICT UNM - Kab Gowa
Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	BKPSDM Kab. Kepulauan Aru
Kementerian Agama	UPT BKN Mamuju
Badan Kepegawaian Negara	Kanreg IV BKN Makassar
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Kanreg IV BKN Makassar
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	UPT BKN Palu
Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan	UPT Bidang Potensi dan Kompetensi (Assesment Center)
Pemerintah Kab. Buton Utara	BKD Prop. Sulawesi Selatan
Pemerintah Kab. Kolaka	Gedung CAT BKPSDM Kab. Buton Utara
	AULA BKPSDM Kab. Kolaka
Setjen Komisi Pemilihan Umum	Kanreg IV BKN Makassar
Mahkamah Agung RI	UPT BKN Kendari
Pemerintah Kota Ambon	SMPN 2 Ambon
Kementerian Agama	UPT BKN Ambon
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	UPT BKN Palu

Kemudian terkait dengan nilai Passing Grade peserta yang kemungkinan hasil tesnya sama persis maka sudah ada aturan Menteri PANRB untuk menentukan kelulusannya, yaitu yang IPK lebih tinggi. Jika IPK-nya masih sama, maka didahulukan yang umurnya lebih tua. Dan jika dari hasil seleksi CPNS ini ada formasi yang tidak terisi atau terpenuhi maka formasi dibiarkan kosong dan akan diisi untuk rekrutmen CPNS berikutnya.

4). Beberapa Kendala

Terkait kendala proses persiapan pelaksanaan penerimaan CPNS, Kanreg IV BKN Makassar berhadapan dengan masalah lemotnya jaringan internet untuk daerah-daerah kepulauan, misalnya yang ada di wilayah Maluku. Meskipun selalu bisa diatasi, sering kali petugas kesulitan menghimpun dan menginput data pendaftaran karena jaringan internet yang tidak bagus. Dalam konteks ini, Kanreg IV Makassar memaksimalkan peran BKD setempat agar semua persiapan seleksi CPNS dapat dilakukan dengan baik.

Dalam pelaksanaan tes SKD juga demikian. Selain terkait dengan sarana dan prasarana, perihal lain yang perlu diperhatikan oleh BKN, Kanreg, dan BKD adalah terkait kesiapan perangkat IT sebagai pendukung penting dalam pelaksanaan tes CPNS. Oleh karena itu, Panselnas penting berkoordinasi dengan penyedia layanan, dalam hal ini, pihak telkomsel.

Selain dengan Telkomsel, BKN, dalam hal ini Panselnas, juga bekerjasama dengan beberapa pihak, misalnya dengan BPPT untuk mengaudit terkait perangkat IT, termasuk aplikasi yang digunakan untuk proses seleksi CPNS. Semua potensi-potensi yang akan mengganggu jaringan internet dan jalannya proses seleksi akan dipastikan aman. Bukan hanya itu, seluruh infrastruktur sebelum digunakan harus sudah dipastikan diaudit terlebih dahulu. Setelah diaudit, semua ruangan disegel dan disaksikan oleh seluruh instansi dan dilengkapi dengan berita acara. Begitu juga saat akan membuka segel, seluruh instansi terkait akan turut menyaksikan bahwa semua proses ini dilakukan secara fair dan transparan.

Agar jaringan aman, Panselnas memagari jaringan yang digunakan dengan cara yang ketat. Dan jaringan yang digunakan adalah jaringan domestik agar lebih mudah dikontrol dan aman dari aksi pembobolan. Hanya admin yang telah diregistrasi saja yang bisa masuk dan melakukan transfer data hasil tes seleksi.

Untuk beberapa daerah di kepulauan dan pegunungan memang selalu ada kendala yang muncul. Oleh karena itu, untuk daerah-daerah terpencil, infrastruktur jaringan yang dimanfaatkan panselnas adalah jaringan yang dimiliki pemerintah.

Selain dengan BPPT, BKN juga melibatkan BPKP yang bertugas mengawasi seluruh proses seleksi. Meskipun demikian, masing-masing inspektorat tetap punya tanggung jawab untuk memastikan semua infrastruktur terkait pelaksanaan CPNS siap dilakukan.

5). Permasalahan Tenaga Honorer

Kunker Spesifik Komisi II DPR RI ke Kanreg IV BKN Makassar, selain meninjau pelaksanaan seleksi CPNS, juga mendalami permasalahan tenaga honorer.

Dalam PP No. 48 Tahun 2005 Jo. PP No. 43 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Tenaga Honorer Kategori satu (THK-1) adalah tenaga honorer yang dibiayai dari APBN/APBD dengan kriteria, a) bahwa yang bersangkutan diangkat oleh pejabat yang berwenang di Instansi Pemerintah; b) Pada tanggal 31 Des 2005 telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus menerus; c) Pada tanggal 1 Jan 2006 telah berusia paling rendah 19 tahun dan paling tinggi 46 tahun. PP No. 48 Tahun 2005 tersebut juga menjelaskan bahwa PPK dilarang mengangkat Tenaga Honorer atau sejenisnya.

Sejak tahun 2005 itu, pemerintah juga melakukan proses pendataan awal terhadap THK-1. Hasilnya terdapat 920.702 orang, dan yang berhasil diangkat sebagai PNS dengan tanpa seleksi sebanyak 860.220 orang. Sisanya THK-1 yang tidak memenuhi kriteria dan berkasnya yang tidak lengkap meskipun sudah diberikan tenggang waktu hingga 2 tahun.

Mengenai THK-2 disebut dalam PP 56 Tahun 2012. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa kriteria THK-2 adalah sama dengan THK-1, tetapi mereka dibiayai bukan dari APBN/APBD. Dalam Pasal 6A ayat (2) dalam PP tersebut dijelaskan bahwa seleksi dilakukan 1 kali (atas kesepakatan 3 komisi DPR RI (Komisi II, Komisi VIII, dan X) pada periode itu.

Untuk memenuhi aspirasi masyarakat, pemerintah melakukan proses pendataan kembali melalui usulan yang diajukan oleh PPK. Dari data usulan PPK tersebut terdapat 673.737 orang yang kemudian disebut sebagai Tenaga Honorer Kategori-2 (THK-2). Dari jumlah tersebut yang telah mengikuti ujian seleksi CPNS tahun 2013 sebanyak 648.462 orang, dan yang lulus sebanyak 209.872 orang. Sisanya sebanyak 438.590 orang dinyatakan tidak lulus seleksi.

Melihat kronologi di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2005 sampai tahun 2014, total tenaga honorer (THK-1 dan THK-2) yang telah diangkat menjadi PNS adalah 1.070.092 orang. Dalam kurun waktu yang sama, jumlah tenaga honorer yang telah diangkat menjadi PNS lebih banyak dari pelamar umum yang hanya sebanyak 775.884 orang.

Dengan demikian, roadmap penanganan TKH-2 sudah diatur dalam PP No. 56 Tahun 2012. Untuk melaksanakan perintah PP tersebut, seleksi terhadap THK-2 untuk menjadi CPNS telah dilaksanakan tahun 2013. Bagi THK-2 yang tidak lulus seleksi pada tahun 2013, pada tahun 2018 telah diberi kesempatan kembali untuk ikut seleksi sebagai CPNS melalui formasi khusus TH eks K-2 untuk yang berusia di bawah 35 tahun. Sedangkan bagi yang berusia di atas 35 tahun telah diberikan kesempatan untuk ikut seleksi sebagai PPPK pada Februari tahun 2019.

TH eks K-2 masih akan diprioritaskan untuk seleksi PPPK sampai dengan tahun 2023 sesuai dengan kebutuhan organisasi dan memenuhi persyaratan jabatan serta sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Jika tidak bisa tahun ini maka tahun 2021, rekrutmen PPPK akan dibuka lagi. Selain perlu menyiapkan rekrutmen PPPK selanjutnya, saat ini, BKN sedang menunggu Perpres untuk pengangkatan penganggaran untuk THK-2 yang sudah dinyatakan lulus menjadi PPPK pada seleksi tahun Februari 2019.

Merujuk pada PP 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS sebagai telah diubah melalui PP 56 Tahun 2012 disebutkan bahwa sejak ditetapkannya peraturan dimaksud, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi Pemerintah dilarang mengangkat Tenaga Honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut, sesuai ketentuan UU No. 43 Tahun 1999 yang diganti menjadi UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN khususnya Pasal 6 telah disebutkan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Hal ini mengandung makna bahwa sejak UU ini ditetapkan, instansi Pemerintah tidak diperkenankan lagi mengangkat Pegawai Non ASN, selain PNS dan PPPK.

Untuk menyelesaikan Tenaga Honorer membutuhkan semangat yang sama dari semua pihak terkait, tidak terkecuali dari pemerintah daerah. Keengganan pemerintah daerah mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak karena berbagai alasan memang menjadi kendala untuk pengangkatan tenaga honorer. Untuk beberapa daerah, alokasi belanja pegawainya mungkin memang sudah di atas 50% dari jumlah APBDnya.

Pada bagian lain, perlu juga diakui bahwa tidak semua daerah memiliki kemampuan untuk menyusun Peta Jabatan Instansinya dan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk memenuhi kebutuhan instansinya sendiri. Dan bagi daerah yang belanja pegawainya sudah tinggi maka sebelum diberikan formasi pengangkatan ASN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Untuk daerah otonom baru dimungkinkan untuk selalu diberikan alokasi formasi untuk pengangkatan ASN agar layanan publik tidak terganggu.

III. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah (Kanreg, BKD, BKN, dan Kemen PANRB) untuk berkoordinasi secara lebih maksimal dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan seleksi CPNS. Termasuk juga menyangkut kebutuhan unit computer dan jaringan internet yang lemot di daerah-daerah terpencil yang kerap menjadi kendala dalam pelaksanaan teknis penginputan data.
2. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah agar memantau secara terus menerus agar proses seleksi CPNS ini berjalan dengan lancar, fair, objektif, dan bebas dari praktek joki sehingga seleksi ini menghasilkan ASN yang unggul dan berkualitas.
3. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah agar proses seleksi CPNS 2019-2020 untuk berpegang teguh pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
4. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan pengangkatan Tenaga Honorer K-2 yang telah dinyatakan lulus seleksi pada Penerimaan PPPK pada Februari 2019.

5. Komisi II DPR RI mendorong pemerintah agar segera memastikan roadmap penyelesaian Tenaga Honorer K-2 yang belum terakomodir.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Regional IV BKN Makassar. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 Februari 2020
KETUA TIM KUNJUNGAN SPESIFIK
KOMISI II DPR RI

H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270